



.....  
**REVITALISASI ARSIP PASCA GEMPA BUMI 7,0 SCALA RICHTER TAHUN 2018 DI  
KANTOR KECAMATAN PEMENANG, TANJUNG DAN GANGGA, KABUPATEN  
LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh

**Basuki Srihermanto<sup>1</sup> & Deddy Iskandar<sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram**

**Email: [basukisrihermanto@yahoo.com](mailto:basukisrihermanto@yahoo.com)**

**Abstrak**

Musibah gempa bumi yang menimpa pada beberapa wilayah di Pulau Lombok menimbulkan kerusakan pada segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pun pada perkantoran yang menyebabkan kerusakan arsip dimana arsip merupakan salah satu media kerja dalam kegiatan bernegara. Bencana gempa bumi yang memiliki daya efek merusak yang cukup masiv, mencapai 7 SR, sehingga kerusakan fisik yang cukup signifikan merusak sistem arsip dan arsip yang ada pada kantor instansi pemerintah yang ada di kecamatan Pemenang, Tanjung dan Gangga dimana ketiga Kecamatan ini merupakan daerah paling terdampak pada kejadian gempa 7 SR yang menimpa P. Lombok di tahun 2018 lalu. Banyak arsip dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dicegah kerusakannya karena gempa terjadi dengan tiba-tiba. Adapun permasalahan yang muncul adalah diperlukannya penanganan arsip pasca bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekontruksi arsip belum dilaksanakan secara maksimal. Pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi, prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan koordinasi kerja dengan instansi terkait juga belum dilaksanakan secara maksimal. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses revitalisasi arsip yang dilakukan di 3 kantor Kecamatan di Kab. Lombok Utara yang merupakan daerah paling terdampak akibat gempa 7 SR di P. Lombok. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan berupa : upaya yang dapat dilakukan dalam revitalisasi arsip pasca gempa, sistem arsip dan media penyimpanan arsip yang ideal untuk mempermudah dalam kegiatan revitalisasi arsip pada daerah rawan gempa dan alat atau bahan yang diperlukan dalam mengantisipasi kerusakan pada arsip akibat gempa didaerah rawan gempa. Target luaran penelitian ini adalah berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan menjadi acuan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan referensi bagi mata kuliah Administrasi Perkantoran dan Kearsipan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal yang terjadi pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dan fakta yang terjadi di lapangan ternyata hingga saat ini belum mampu untuk melakukan revitalisasi arsipnya pasca bencana gempa bumi tahun 2018. Yang ada hanya kegiatan rehabilitasi arsip yang dilakukan seadanya dan dalam kondisi darurat saja. Melihat fenomena ini diperlukan suatu tindakan yang simultan untuk dapat mendukung keberadaan arsip pasca gempa di KLU. Sehingga proses Revitalisasi Aersip sesuai perundang-undangan negara Republik Indonesia dapat terealisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan membahas bagaimana merangkum sekumpulan data hasil penelitian, menganalisa dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Analisis data juga bersifat terbuka (*open ended*), dikatakan demikian karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan



penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk, tidak dapat ditentukan lebih dahulu data apa yang diperlukan pada taraf permulaan.

**Kata Kunci : Revitalisasi, Arsip, Pasca Gempa, Arsip Kantor**

## PENDAHUALUAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Dari studi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa elemen yang dapat menjadi titik pandang penelitian antara lain keterbatasan sarana revitalisasi arsip, keterbatasan kapasitas sumber daya dan dampak keberlanjutan yang mungkin timbul karena ketidakmampuan obyek penelitian untuk melakukan kegiatan kearsipannya. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kegiatan revitalisasi arsip pada kantor kecamatan yang terdampak gempa tersebut. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana revitalisasi arsip yang dilakukan pada kantor Camat Pemenang, Tanjung dan Gangga yang merupakan daerah terdampak oleh gempa bumi 7 SR di tahun 2018.. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi revitalisasi arsip pasca gempa 7 SR pada kantor Camat Pemenang, Tanjung dan Gangga Kabupaten Lombok Utara Propinsi Nusa Tenggara Barat.

## LANDASAN TEORI

### Menyelamatkan Arsip dari Bencana

Penanganan arsip pascabencana yaitu upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,

yang meliputi, pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan peningkatan koordinasi kerja dengan instansi terkait.

### Peraturan dan Undang-undang

Untuk meminimalisir dampak bencana terhadap arsip, pemerintah telah membuat beberapa Undang-undang dan peraturan yaitu :

1. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan yang merupakan Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 ini dibuat mengingat bahwa pada kurun waktu antara 1990 sampai dengan tahun 2004 terjadi banyak bencana alam maupun bencana nonalam yang terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan sangat banyak korban jiwa, harta benda dan sarana-prasarana. Kerugian-kerugian material dan nonmaterial tersebut juga termasuk kerusakan arsip vital, yang merupakan aset bagi organisasi dan negara. Peran arsip vital sangat penting karena terkait dengan pentingan organisasi, instansi dan perseorangan atau kepentingan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, arsip vital harus dilindungi dari ancaman yang menyebabkannya musnah, hilang atau rusak yang diakibatkan oleh bencana. Melalui pengelolaan arsip vital yang terprogram akan memberikan perlindungan, pengamanan dan penyelamatan terhadap dokumen/arsip vital ketika terjadi bencana.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Pasal 6 huruf 'g' disebutkan, bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dalam Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3), disebutkan bahwa negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara dari bencana. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, juga disebutkan, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Dari Bencana. Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015, yang pada pasal-pasalnya menyebutkan secara menyeluruh dan lengkap aktivitas perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dimulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat, saat pascabencana (pasal 4), jenis arsip yang dilindungi dan diselamatkan adalah arsip milik Negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, yang berupa arsip arsip dinamis, arsip statis, arsip terjaga dan arsip vital dalam media kertas, elektronik dan atau audio visual (pasal 5), penanggungjawab kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip (pasal 7).

Selain dari Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

(Menpan) pada tanggal 17 Agustus 2016 telah mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang dipelopori oleh ANRI, sebagai upaya pelaksanaan kearsipan yang baik. Strategi utama GNSTA adalah:

- Menertibkan Arsip di Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kearsipan.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kearsipan pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung serta penyelenggaraan diklat kearsipan, pengawasan dan sosialisasi.

Penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 pasal 4, yang tahapannya adalah prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Tahapan prabencana yaitu antara lain :

1. Lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah perlu melakukan sosialisasi secara maksimal dan menyeluruh tentang undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
2. Melakukan antisipasi atau tindakan preventif sebelum terjadi bencana, yaitu mengetahui dan memahami letak atau lokasi lembaganya, apakah terletak di daerah rawan banjir, rawan longsor, dekat dengan gunung berapi dan rawan gempa. Bila lembaga yang menyimpan arsip- arsip vital ini terletak di daerah rawan bencana, maka harus dipersiapkan peralatan penyimpanan arsip yang aman seperti lemari arsip dan boks arsip yang tahan api, tahan air, tahan debu dan tahan lumpur.
3. Perlu ada perencanaan dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari



- bencana, mulai dari antisipasi terjadinya bencana, koordinasi, penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
4. Membentuk tim penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
  5. Melakukan pelatihan teknis kepada pegawai-pegawai di instansi agar terampil melakukan penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana.
  6. Membentuk sistem informasi dan komunikasi terpadu, yaitu komunikasi antara pimpinan instansi, para staf di instansi, aparat keamanan, pihak-pihak yang terkait dengan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana setempat, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, serta masyarakat yang bisa dimintai bantuan. Selain itu juga memperhatikan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang cuaca, kondisi alam, lingkungan dan kondisi bumi.
  7. Bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang lokasinya jauh dari lokasi bencana, yang dapat dijadikan tempat penitipan sementara untuk mengamankan arsip dari bencana.

Tahapan tanggap darurat yaitu pengelola arsip harus melakukan analisa teoritis tentang penyebab dan akibat dari bencana dan mulai merencanakan tindakan perlindungan dan penyelamatan arsip dalam waktu yang singkat. Selain itu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga kearsipan dalam upaya :

- mengurangi resiko kerusakan fisik arsip dan informasi yang terkandung di dalamnya.
- melakukan dukungan dalam penanganan kerusakan arsip
- penyelamatan dan evakuasi arsip, pelayanan perbaikan arsip, normalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan arsip.

Menurut Tulus Chandra dalam tulisannya Penyelamatan Arsip Pasca Bencana,

**Vol.14 No.2 September 2019**

Ada beberapa metode perlindungan terhadap arsip penting dari musibah bencana alam, Yang sering digunakan adalah dengancara menyediakan tempat khusus penyimpanan (*vaulting*) seperti brankas yang tahan api dan tahan air, bunker, atau lemari besi. Selain itu metode perlindungan arsip yang juga banyak dilakukan adalah dengan cara alih media dari bentuk kertas menjadi media lain baik dalam bentuk microfilm ataupun CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory), yaitu suatu media yang dapat dibaca

Ada beberapa langkah penyelamatan terhadap arsip yang terkena musibah bencana tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengevakuasi dan menempatkan arsip yang terkena musibah bencana ke tempat yang lebih aman, misalnya yang tidak tergenang air banjir, atau yang kering dan lebih bersih.
- b. Mengidentifikasi jenis kerusakan, jumlah dan tingkat kerusakan arsip, sehingga akan mempermudah metode perbaikan yang akan digunakan.
- c. Recovery yaitu memulihkan kondisi baik fisik maupun tempat penyimpanan dengan cara rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pengelola arsip di lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah juga harus melakukan penanggulangan, yaitu melakukan mobilisasi bantuan tanggap darurat terhadap pencipta arsip, bantuan dan penanganan arsip, bantuan penanganan sarana kearsipan, penanganan infrastruktur kearsipan, pemulihan fungsi penyelenggaraan kearsipan, bantuan konsultasi kearsipan. Dari beberapa Undang-undang yang dibuat pemerintah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan program GNSTA tersebut di atas, seharusnya penanggulangan bencana yang berdampak pada kerusakan dan musnahnya arsip dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**



## METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan, mengumpulkan data, menentukan objek dan subjek penelitian, menentukan metode penelitian yang akan digunakan, menyusun jadwal waktu penelitian dan mencari literatur (studi kepustakaan) yang bisa membantu menjelaskan dan memberikan jawaban dari rumusan masalah. Lokasi penelitian adalah di Kantor Camat Pemenang, Kantor Camat Tanjung dan Kantor Camat Gangga.. Obyek penelitian adalah tentang Revitalisasi arsip yang dilakukan terkait dengan Gempa Bumi 7 skala Richter yang telah menimpa ketiga Kecamatan ini dan juga bagaimana strategi Revitalisasi Arsip yang dilakukan pada ketiga kantor Camat tersebut. Subyek penelitian adalah bagian arsiparis Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB. Fokus penelitian disesuaikan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, apabila peneliti menemukan hal-hal lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memaparkan dalam hasil penelitian sebagai bentuk penyempurnaan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik yang saling mendukung guna mempertajam analisis data dan proses triangulasi. Teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Observasi Pengumpulan Data, dilakukan berdasarkan hasil pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti terlibat langsung dengan program yang akan diteliti agar data yang diperoleh lebih lengkap dan tajam.
2. Wawancara Pengumpulan Data, dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui pendekatan semi terstruktur untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.
3. Dokumentasi Pengumpulan Data, dilakukan melalui pengumpulan dokumen dalam bentuk gambar dan berkas yang terkait dengan permasalahan. Dokumentasi yang diambil harus mendukung analisis data hasil penelitian. Dokumen ini yang nantinya akan menjadi rujukan untuk menentukan evaluasi, kontrol dan tingkat perbaikan. Teknik ini dilakukan sebagai pelengkap observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif berdasarkan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dengan tetap mengedepankan penelusuran representatif untuk menghindari data bias. Kemudian dikaji secara kualitatif sesuai dengan teori yang digunakan dan dikembangkan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan pertama kali untuk menangani bencana adalah penyelamat jiwa manusia dan harta benda. Arsip yang keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia, sering tidak terpikirkan untuk penyelamatannya. Penyelamatan arsip tidak hanya menyelamatkan fisiknya, tetapi juga menyelamatkan informasi yang terekam di dalamnya. Penyelamatan arsip dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia memerlukan penanganan yang serius dan penting dilakukan, karena arsip merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu institusi, baik pemerintah maupun swasta penting melakukan upaya antisipasi dan penyelamatan arsip-arsipnya. Tujuan utama program penyelamatan dokumen/arsip adalah pelestarian jangka panjang sehingga keberlanjutan arsip dapat dijamin.

Walaupun telah ada Undang-undang dan peraturan tentang perlindungan dan penyelamatan arsip, namun selalu saja pengelola arsip di lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial, organisasi masyarakat dan masyarakat umum kebingungan dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan



arsipnya. Begitu juga yang terjadi pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dan fakta yang terjadi di lapangan ternyata hingga saat ini belum mampu untuk melakukan revitalisasi arsipnya pasca bencana gempa bumi tahun 2018. Yang ada hanya kegiatan rehabilitasi arsip yang dilakukan seadanya dan dalam kondisi darurat saja.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan dari Undang-undang tentang Kearsipan dan Peraturan yang dibuat oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Undang-undang dan peraturan-peraturan tentang kearsipan, khususnya untuk perlindungan dan penyelamatan arsip, yang telah dibuat pemerintah dan ANRI. Faktor penyebab utamanya adalah karena begitu masive nya kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi yang melanda sehingga meluluhlantakkan inrastruktur yang ada pada ketiga kantor Camat di Kabupaten KLU tersebut.

Adapun dalam perspektif administrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh pengelola arsip oleh ketiga kantor Camat KLU tersebut dalam kegiatan revitalisasi arsip belum sepenuhnya melakukan apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kearsipan. tersebut terlihat dari tahapan prabencana, yaitu :

1. Sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan arsip dan revitalisasi arsip belum dilakukan secara maksimal kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana. Akibatnya adalah ketika terjadi bencana pengelola arsip tidak secara cepat dan tanggap menghadapi situasi bencana yang mengancam arsip. Mereka kebingungan ketika harus menyelamatkan arsip yang hancur dan rusak.
2. Belum ada pelatihan teknis yang kontinyu untuk pegawai-pegawai di

lembaga-lembaga arsip di pusat dan daerah serta di instansi, sehingga kegiatan revitalisasi arsip serta penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana tidak terarah dan sistematis. Ketiadaan SDM yang mumpuni dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana mengakibatkan penanganan dan penyelamatan arsip sangat lambat dan arsip banyak yang rusak bahkan musnah.

3. Perencanaan dalam penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana, belum dilakukan secara maksimal oleh lembaga-lembaga kearsipan di tingkat pusat maupun daerah, sehingga ketika terjadi bencana tidak ada koordinasi yang sistematis dalam penanganan dan penyelamatan arsip.
4. Tidak ada Pembentukan tim penanganan dan penyelamatan arsip dari bencana, sehingga ketika terjadi bencana, banyak arsip yang rusak dan tidak dapat ditangani .
5. Sistim informasi dan komunikasi terpadu di antara pimpinan instansi, para staf di instansi, aparat keamanan, pihak-pihak yang terkait dengan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana setempat, Dinas Pemadam Kebakaran, Palang Merah Indonesia, serta masyarakat belum berjalan. Hal ini mengakibatkan penanganan arsip yang terkena bencana berjalan lambat.

Penanganan arsip pasca bencana yang meliputi revitalisasi, rehabilitasi dan rekontruksi arsip belum dilaksanakan secara maksimal pada ketiga kantor Camat tersebut. Pemulihan fungsi prasarana kearsipan, rehabilitasi infrastruktur kearsipan, rekonstruksi prasarana kearsipan, peningkatan kapasitas sistem kearsipan, perbaikan lingkungan kerja, penataan ruang pengelolaan arsip, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip, dan koordinasi kerja dengan instansi terkait juga belum dilaksanakan secara maksimal.



Pengembangan SDM di bidang kearsipan menjadi tantangan di masa yang akan datang, yang akan melindungi dan menyelamatkan arsip sebagai aset negara. Untuk pelibatan arsiparis dalam perlindungan dan penyelamatan arsip masih belum direalisasikan secara maksimal di Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB . Sosialisasi kepada arsiparis Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB tentang peran penting arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dilakukan secara kontinyu dan sistematis. Peran serta institusi baik pemerintah maupun lembaga pendidikan sangat dibutuhkan agar upaya perlindungan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh ANRI, Arsip Daerah provinsi dan Arsip Daerah Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB terjadi kerusakan yang sangat masive yang dikarenakan gempa bumi sehingga meluluh lantakkan semua arsip yang ada.
2. Pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB belum dilakukan Revitalisasi Arsip secara prosudural. Yang dilakukan baru berupa rehabilitasi darurat saja.
3. Pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB belum mampu untuk melakukan kegiatan Revitalisasi Arsip secara benar hal ini karena belum didukung oleh SDM yang memadai untuk hal tersebut.
1. Diperlukan peran serta Pemerintah dan Lembaga Pendidikan untuk membantu sistem kearsipan pada Kantor Camat

Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB

### Saran

Saran yang dapat diberikan berdasar pada penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang revitalisasi Arsip pada Pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB.
2. Perlu dilakukan pelatihan SDM untuk menangani arsip khususnya dalam kegiatan revitalisasi arsip pada Pada Kantor Camat Pemenang, kantor Camat Tanjung dan kantor Camat Gangga Kabupaten Lombok Utara NTB.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] ANRI dalam Majalah ARSIP Edisi 60 Tahun 2013
- [2] Chandra Tulus, Penyelamatan Arsip Pasca Bencan, 2016
- [3] Sitepu, Apallidya, dkk. *Kesiapsiagaan Dalam Mengantisipasi Bencana Di Perpustakaan Dan Pusat Arsip*. Jakarta : PDII-LIPI, dalam Jurnal BACA: Jurnal Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan, Vol. 30, No.1, Agustus 2009
- [4] Sulistyio-Basuki. 2013. *Manajemen Arsip Dinamis : Pengantar memahami dan mengelola Informasi dan Dokumen* . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- [5] Surotani, Suhardo.2011. *Perlindungan Arsip Vital* .Yogyakarta: Kanisius.
- [6] Widayanti, Tuti Sri. *Pendokumentasian Arsip Bencana Upaya Mengetahui Pola Penanggulangan Bencana* .
- [7] <https://www.suarakarya-online.com,21/03/2007>
- [8] <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka141>
- [9] Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara



- 
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- [11] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007  
Tentang Penanggulangan Benca.